

AKUNTANSI DALAM KEADAAN HIPERINFLASI MENURUT IAS DAN PSAK

PENDAHULUAN

Dalam keadaan ekonomi yang sedang mengalami hiperinflasi, pelaporan posisi keuangan dan laba rugi dalam keadaan yang belum disesuaikan akan menjadi tidak bermanfaat. Uang kehilangan daya belinya sehingga tanpa adanya penyesuaian, laporan keuangan akan menyesatkan.

Untuk menjamin terpenuhinya prinsip laporan keuangan yang *fairly stated*, IAS mengeluarkan standar IAS 29 tentang *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies* yang mengatur cara penyajian kembali laporan keuangan dalam kondisi hiperinflasi. IAS 29 ini belum diadopsi dalam PSAK tahun 2009, namun akan diadopsi dalam PSAK tahun 2012. Saat ini dewan standar PSAK telah mengeluarkan Exposure Draft PSAK nomor 63 tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi. ED PSAK 63 ini mengadopsi semua ketentuan dalam IAS 29 kecuali tanggal berlaku efektif.

AKUNTANSI DALAM KEADAAN HIPERINFLASI MENURUT IAS

Penerapan IAS 29 dilakukan pada entitas yang mata uang fungsionalnya sedang mengalami kondisi hiperinflasi. Dalam IAS 29, tidak ada batasan tertentu tingkat inflasi yang dapat dinyatakan sebagai hiperinflasi. Untuk itu, IAS 29 mengeluarkan parameter yang dapat dijadikan indikasi bahwa suatu Negara sedang mengalami hiperinflasi, yaitu:

- a. Penduduknya lebih memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset nonmoneter atau dalam mata uang asing yang relatif stabil. Jumlah mata uang lokal yang dimiliki segera diinvestasikan untuk mempertahankan daya beli;
- b. Penduduknya mempertimbangkan jumlah moneter bukan dalam mata uang lokal tetapi dalam mata uang asing yang relatif stabil. Harga-harga mungkin dikuotasikan dalam mata uang asing tersebut;
- c. Harga yang berlaku dalam penjualan dan pembelian secara kredit ditentukan dengan memasukkan faktor ekspektasi hilangnya daya beli selama periode kredit, bahkan jika periode kreditnya singkat;
- d. Suku bunga, upah dan harga dikaitkan dengan indeks harga; dan
- e. Tingkat inflasi kumulatif selama tiga tahun mendekati atau melebihi 100%.

Apabila kondisi diatas terjadi di suatu Negara, maka entitas yang mata uang fungsionalnya adalah mata uang Negara yang mengalami hiperinflasi tadi harus menyajikan kembali laporan keuangannya dalam unit pengukuran yang berlaku pada akhir periode pelaporan baik entitas tersebut menggunakan pendekatan nilai historis ataupun nilai wajar.

Prosedur penyajian kembali laporan keuangan dalam kondisi hiperinflasi dilakukan sebagai berikut:

I. PENDEKATAN BIAYA HISTORIS

a. Laporan posisi keuangan

1. Jumlah dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam general price index (indeks harga umum) bila belum dinyatakan dalam unit pengukuran kini
2. Pos-pos moneter (uang yang dimiliki atau yang akan dibayarkan dalam bentuk uang) tidak disajikan kembali
3. Aset dan kewajiban yang terikat perjanjian untuk perubahan harga disajikan kembali sesuai dengan perjanjian untuk memastikan saldo pada akhir periode pelaporan.
4. Aset non moneter yang disajikan dalam nilai realisasi bersih dan nilai pasar tidak disajikan kembali.
5. Aset non moneter yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi biaya penyusutan disajikan kembali sesuai dengan jumlah kini pada tanggal akuisisinya.
6. Aset non moneter yang telah disajikan kembali dikurangi sesuai dengan standar terkait. ketika jumlah tersebut melebihi jumlah terpulihkan. Misalnya, jumlah aset tetap, *goodwill*, paten dan merek dagang yang disajikan kembali dikurangi menjadi jumlah terpulihkan, dan jumlah persediaan yang disajikan kembali dikurangi menjadi nilai realisasi neto.
7. Akun ekuitas kecuali laba ditahan dan surplus revaluasi disajikan kembali dengan menggunakan indeks harga umum. Saldo revaluasi dihapuskan.

b. Laporan laba rugi komprehensif

Seluruh pos dalam laporan laba rugi komprehensif dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan. Oleh karena itu, seluruh jumlah perlu untuk disajikan kembali dengan menerapkan perubahan indeks harga umum dari tanggal pos pendapatan dan beban tersebut awalnya dicatat dalam laporan keuangan

c. Keuntungan atau Kerugian Posisi Moneter Neto

Adanya hiperinflasi akan dapat mengakibatkan selisih antara asset moneter dan liabilitas moneter. Keuntungan atau kerugian posisi moneter ini disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

II. PENDEKATAN BIAYA KINI

a. Laporan posisi keuangan

Pos-pos yang disajikan pada biaya kini tidak disajikan kembali karena sudah dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan.

b. Laporan laba rugi komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif yang menggunakan biaya kini, sebelum penyajian kembali, secara umum melaporkan biaya kini pada waktu terjadinya transaksi atau peristiwa yang mendasari. Oleh

karena itu, seluruh jumlah tersebut perlu disajikan kembali dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan dengan menggunakan indeks harga umum

c. Keuntungan atau Kerugian Posisi Moneter Neto

Adanya hiperinflasi akan dapat mengakibatkan selisih antara asset moneter dan liabilitas moneter. Keuntungan atau kerugian posisi moneter ini disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

d. Laporan Arus Kas

Seluruh pos dalam laporan arus kas dinyatakan dalam unit pengukuran kini pada akhir periode pelaporan

AKUNTANSI DALAM KEADAAN HIPERINFLASI MENURUT PSAK

Pelaporan keuangan dalam kondisi hiperinflasi sampai saat ini belum diatur dalam PSAK. Standar IAS 29 ini akan diadopsi pada tahun 2012. Eksposur Draft PSAK nomor 63 tentang Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi telah mengadopsi ketentuan IAS 29 kecuali tanggal berlaku efektif. Dalam adopsi ini, terdapat penyesuaian definisi Indeks harga umum yang berlaku di Indonesia, yaitu indeks yang mengacu ke indeks harga konsumen yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik